



JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimat>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/wwsh5x22>

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020-2024

Ricco Andhika Hudaya^{a*}, Novan Setiawan^b, Aldinda Putri Nuraini^c, Fitri Nopitasari^d, Puji Lestari^e, Gurhanawan^f

^a Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; 63230694@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta

^b Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; 63230564@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta

^c Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; 63230407@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta

^d Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; 63230763@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta

^e Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; 63230843@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta

^f Ekonomi & Bisnis / Akuntansi; gurhanawan.ghn@bsi.ac.id, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta

* Penulis Korespondensi: Ricco Andhika Hudaya

ABSTRACT

Following fiscal decentralization, local governments are required to optimize budgetary autonomy to minimize reliance on the central government. This study examines the impacts of Regional Original Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), and General Allocation Funds (DAU) in constructing the Financial Performance of City Governments in Central Java Province throughout the 2020–2024 fiscal years. This quantitative investigation applies a census design (saturated sampling) encompassing all city governments (6 entities) within the Central Java region. Utilizing secondary panel data sourced from the Budget Realization Reports (LRA), this study yields 30 observation units evaluated through multiple linear regression analysis via the SPSS version 30 software. Partially, the test results confirm that PAD positively and significantly stimulates regional financial performance, aligning with Stewardship Theory. Conversely, due to the emergence of a fiscal comfort zone arising from substitution effects, DAU is detected to exert a significant negative influence. Meanwhile, the rigid nature of DAK as a specific grant prevents it from demonstrating any meaningful effect. Simultaneously, these three revenue posts contribute substantially to determining the Financial Performance of City Governments in Central Java Province during the 2020–2024 era. This study concludes that accelerating regional fiscal performance fundamentally demands progressive intensification of PAD and the efficient governance of balancing funds.

Keywords: *Regional Original Revenue; Special Allocation Fund; General Allocation Fund; Local Government Financial Performance; and Stewardship Theory.*

Abstrak

Pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan kemandirian anggaran pasca-desentralisasi fiskal agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisasi. Penelitian ini bertujuan menguji dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mengonstruksi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun fiskal 2020–2024. Penelitian kuantitatif ini menerapkan desain sensus (sampel jenuh) yang mencakup seluruh pemerintah kota (6 entitas) di wilayah Jawa Tengah. Menggunakan data panel sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), studi ini menghasilkan 30 unit observasi yang dievaluasi lewat regresi linear berganda berbasis program SPSS versi 30. Secara parsial, hasil pengujian mengonfirmasi bahwa PAD menstimulasi kinerja keuangan daerah ke arah positif dan signifikan, yang selaras dengan Teori Stewardship. Sebaliknya, akibat timbulnya zona nyaman fiskal (*fiscal comfort zone*) dari dampak substitusi DAU terhadap PAD, DAU terdeteksi membawa pengaruh negatif yang signifikan. Sementara itu, kaku-nya sifat DAK selaku *specific grant* membuatnya tidak memperlihatkan pengaruh yang bermakna. Secara simultan, ketiga pos pendapatan tersebut berkontribusi nyata dalam mendeterminasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah era 2020–2024. Studi ini menyimpulkan bahwa akselerasi performa fiskal daerah

secara fundamental menghendaki intensifikasi PAD yang progresif serta tata kelola dana perimbangan yang efisien.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Khusus; Dana Alokasi Umum; Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; dan Teori *Stewardship*.

1. PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia menghadirkan pergeseran mendasar pada sistem tata kelola pemerintahan, yang ditandai oleh peralihan dari pola sentralisasi yang terpusat di pemerintah pusat menuju sistem desentralisasi fiskal. Lewat penguatan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah kini memperoleh kewenangan serta tanggung jawab yang jauh lebih luas. Kewenangan tersebut mencakup penggalan potensi internal, pengelolaan sumber daya keuangan, dan penataan urusan rumah tangga secara mandiri demi mempercepat pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan kerangka otonomi tersebut dicerminkan secara transparan melalui laporan pertanggungjawaban berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan instrumen utama pengukuran kinerja keuangan daerah, di mana evaluasi atas efektivitas dan efisiensi atas implementasi pos anggaran tersebut diukur melalui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara teoritis, Teori *Stewardship* menjelaskan hubungan akuntabilitas publik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan administrasi sektor publik, masyarakat bertindak sebagai pemilik yang mengamankan pengelolaan aset daerah kepada pemerintah. Sebagai pihak yang dipercaya atau *steward*, pemerintah daerah mengemban kewajiban moral dan legal untuk menyajikan kinerja keuangan yang optimal, kredibel, dan transparan demi mewujudkan seluruh kepentingan publik selaku principal. Kewajiban ini juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tolak ukur kemandirian keuangan daerah bertumpu pada optimalisasi modalitas PAD yang dikombinasikan secara presisi dengan dana perimbangan pusat seperti DAU dan DAK.

Kondisi aktual di lapangan saat ini memperlihatkan adanya kesenjangan kemampuan fiskal yang cukup mencolok antarwilayah di Indonesia. Jawa Tengah, sebagai provinsi dengan banyak wilayah administratif di Pulau Jawa, menghadapi tantangan finansial yang kompleks dalam mempertahankan kinerja keuangan daerah sepanjang tahun pengamatan 2020-2024. Periode ini menjadi sangat krusial dan menantang karena mencakup fase guncangan resesi ekonomi akibat hantaman pandemi COVID-19 pada tahun 2020, hingga memasuki masa pemulihan makroekonomi pasca-pandemi yang berlangsung dinamis hingga tahun 2024. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional selama kurun waktu tersebut memaksa jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk mengevaluasi strategi penggalan PAD sekaligus mengelola aliran DAU dan DAK secara presisi agar fungsi pelayanan publik serta instrumen pembangunan infrastruktur tidak terhambat. Atas dasar itu, diperlukan kajian empiris ilmiah untuk menelaah seberapa jauh dinamika pos-pos pendapatan tersebut berdampak pada tersebut memengaruhi postur keuangan daerah di Jawa Tengah dalam situasi krisis tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor penentu kinerja keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Putri [1] di wilayah Gerbangkertasusila mengonfirmasi bahwa PAD menstimulasi kinerja keuangan secara positif-signifikan, sedangkan intervensi dana perimbangan cenderung memperlemah kemandirian anggaran daerah. Di sisi lain, pembuktian empiris Pradana [2] di Jawa Timur mendeteksi dampak positif dari PAD, namun memperlihatkan bahwa DAU sama sekali tidak berimplikasi nyata pada performa keuangan lokal. Lebih lanjut, variabel DAK dalam kajian tersebut justru terbukti memberikan disinsentif bagi efisiensi keuangan akibat besarnya alokasi dana pendamping yang wajib disediakan oleh kas daerah. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, studi ini berfokus pada kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode pengamatan 2020–2024 yang mencakup fase krisis pandemi hingga pemulihan ekonomi.

Menyikapi masalah dan kesenjangan riset tersebut, penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2020–2024. Selanjutnya, penelitian ini juga diarahkan guna memvalidasi dampak Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus terhadap performa fiskal pada wilayah dan waktu yang sama. Tidak sebatas pada pengujian individu, kajian ini turut mengevaluasi pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama (simultan) demi mengurai teka-teki kontradiksi temuan akademis masa lalu.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020-2024 (Ricco Andhika Hudayaa)

Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi unik antara lokus penelitian (kota-kota di Jawa Tengah) dan periode pengamatan (2020-2024). Studi ini mengambil lokus secara fokus pada seluruh kota di bawah lingkup administratif Provinsi Jawa Tengah dengan rentang tahun pengamatan terbaru, yaitu 2020 hingga 2024. Pemilihan periode ini menghadirkan tingkat keunikan tersendiri yang Belum terekam di penelitian terdahulu karena berhasil memotret dinamika tata kelola keuangan daerah secara utuh sejak krisis pandemi, hingga menuju tahap pemulihan ekonomi dan normalisasi penuh roda fiskal pascapandemi pada 2024. Struktur komposisi APBD di Jawa Tengah selama lima tahun tersebut menyuguhkan konteks lingkungan makroekonomi yang khas dan berbeda secara substansial dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengasumsikan kondisi ekonomi makro dalam keadaan stabil atau normal.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan secara komprehensif dengan menilik fluktuasi makroekonomi yang bergejolak di koridor fiskal Jawa Tengah sepanjang efemeris 2020–2024. Melalui diskursus tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan guna menyelidik apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengartikulasikan implikasi yang signifikan terhadap artikulasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di wilayah terkait. Lebih jauh, penyelidikan ini diarahkan untuk mengonfirmasi sejauh mana intervensi Dana Alokasi Umum (DAU) mendatangkan dampak nyata, sekaligus memvalidasi kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mengintervensi postur performa finansial pada horizon waktu yang ekuivalen. Tidak sebatas pada pengujian parsial, penelitian ini juga bertujuan menguraikan perdebatan teoretis mengenai pakem pengaruh PAD, DAU, dan DAK kala bersinergi secara simultan dalam mengonstruksi serta mendeterminasi koridor Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah..

Melalui pencapaian target-target tersebut, studi ini diharapkan mampu menyuguhkan kontribusi teoretis maupun praktis yang berharga. Pada tataran teoretis, luaran riset ini diharapkan memperkuat khazanah akuntansi sektor publik, khususnya dalam memvalidasi relevansi Teori *Stewardship* untuk memotret perilaku birokrasi dalam mengelola anggaran publik saat krisis makroekonomi. Pada tataran praktis, rekomendasi akhir riset ini diproyeksikan menjadi rujukan evaluatif dan bahan masukan strategis bagi Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun cetak biru optimalisasi penerimaan lokal, menekan ketergantungan fiskal vertikal, serta memformulasikan efisiensi alokasi dana transfer pusat demi menciptakan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Stewardship Theory*

Stewardship theory atau teori penatalayanan mengasumsikan bahwa perilaku manajemen tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan oleh tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, teori ini memosisikan pemerintah daerah sebagai pengelola yang memiliki integritas dan tanggung jawab penuh untuk bertindak selaras dengan kepentingan masyarakat selaku pemilik sumber daya [3]. Berdasarkan perspektif ini, pemerintah daerah tidak akan mendahulukan kepentingan politik atau birokrasi pribadi, melainkan fokus pada optimalisasi pengelolaan keuangan publik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat [1]. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik maupun birokrasi pribadi. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi perwujudan utama dari sikap penatalayanan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan [2].

2.2. Pendapatan Asli Daerah

PAD menggambarkan seberapa besar kesanggupan finansial sebuah daerah untuk mendanai sendiri penyelenggaraan rumah tangganya berlandaskan asas otonomi. Sumber penerimaan ini sepenuhnya digali dari potensi yang ada di dalam wilayah bersangkutan, meliputi pajak yang dipungut daerah, retribusi daerah, bagian laba dari perusahaan milik daerah (BUMD), serta pendapatan orisinal lain yang sah secara hukum [4]. Semakin tingginya perolehan PAD menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil memaksimalkan potensi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat [5]. Dalam kerangka tata kelola publik, optimalisasi sektor ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi daerah untuk mendanai program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat [6].

Dalam analisis kontribusi anggaran, variabel ini diukur melalui Rasio Pendapatan Asli Daerah untuk melihat sejauh mana sumbangsih penerimaan lokal terhadap struktur total pendapatan daerah. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh [2], perhitungan Rasio Pendapatan Asli Daerah dikerjakan dengan membandingkan nilai total realisasi PAD dengan total perolehan pendapatan daerah secara menyeluruh dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang kemudian dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.3. Dana Alokasi Khusus

DAK dikategorikan sebagai instrumen dana transfer vertikal yang dikirim oleh pemerintah pusat kepada wilayah-wilayah tertentu dengan mandat khusus untuk membiayai program yang menjadi wewenang pemerintah daerah namun selaras dengan prioritas nasional. Distribusi dana transfer ini dikonsentrasikan pada penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik primer, seperti fasilitas aparatur kesehatan, sektor pendidikan, serta akses jalan yang belum mencapai standar pelayanan minimum [7]. Melalui mekanisme dana transfer ini, pemerintah pusat berupaya mengatasi ketimpangan pelayanan publik antar-wilayah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi di daerah target [8]. Efektivitas pemanfaatan dana ini sangat bergantung pada ketepatan perencanaan dan pengawasan dari pemerintah daerah agar tidak terjadi inefisiensi anggaran [9].

Dalam rangka mengukur porsi ketergantungan atas dana transfer spesifik ini di dalam postur anggaran daerah, diaplikasikan indikator Rasio Dana Alokasi Khusus. Merujuk formulasi operasional Ismayasari dkk [3], Rasio DAK diperoleh dengan membagi jumlah realisasi penerimaan DAK dari pusat dengan akumulasi total pendapatan daerah dalam satu periode tahun anggaran.

$$\text{Rasio Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{Total Realisasi Penerimaan DAK}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.4. Dana Alokasi Umum

DAU berfungsi sebagai instrumen dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN, di mana formulasinya didesain untuk meratakan kapasitas finansial antar-daerah guna menutup kebutuhan belanja dalam bingkai pelaksanaan desentralisasi. Penentuan besaran alokasi dana ini bertumpu pada celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang dihitung dari selisih antara kebutuhan belanja daerah dan kapasitas riil fiskal yang dimiliki [10]. Orientasi utama dari penyaluran dana penyeimbang ini adalah meminimalkan ketimpangan finansial antar wilayah (*interregional fiscal disparity*) sekaligus memastikan bahwa setiap daerah mampu menyelenggarakan pelayanan publik standar [11]. Oleh karena itu, dana ini umumnya bersifat *block grant*, di mana pemerintah daerah memiliki keleluasaan penuh untuk mengatur penggunaannya, termasuk untuk membiayai belanja pegawai dan operasional rutin pemerintahan.

Di dalam riset empiris akuntansi sektor publik, besaran stimulus dana transfer ini dianalisis menggunakan indikator Rasio Dana Alokasi Umum guna mengetahui tingkat porsi pembiayaan pusat terhadap total anggaran daerah. Mengikuti pendekatan metodologi dari [12], Rasio Dana Alokasi Umum diperoleh dengan membagi nilai total realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan, kemudian dikalikan seratus persen.

$$\text{Rasio Dana Alokasi Umum} = \frac{\text{Total Realisasi Penerimaan DAU}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.5. Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan daerah merupakan parameter fundamental guna mengalkulasi derajat keberhasilan, efektivitas, serta efisiensi tata kelola anggaran yurisdiksi lokal sepanjang satu siklus fiskal. Pembredahan terhadap rekam jejak performa ini dieksekusi lewat artikulasi pelbagai rasio keuangan yang komprehensif, mencakup rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, hingga keserasian belanja [13]. *Output* dari penilaian ini tidak sebatas memanifestasikan diri sebagai instrumen akuntabilitas publik (*public accountability*), melainkan juga sebagai instrumen evaluasi internal untuk pengambilan keputusan strategis di masa depan [14]. Kinerja keuangan yang sehat menandakan pemerintah daerah mampu menyelaraskan orientasi belanja anggaran dengan target capaian pembangunan daerah secara optimal.

Sebagai proksi dari tingkat capaian keberhasilan tata kelola tersebut, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara empiris direpresentasikan melalui indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Merujuk pada kajian teoretis dan praktis pasca-desentralisasi yang diadopsi oleh [14], rasio kemandirian fiskal ini dihitung dengan mengomparasikan agregat realisasi penerimaan PAD terhadap total pendapatan transfer—baik dari otoritas pusat maupun provinsi ditambah dengan akumulasi perolehan pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2.6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hubungan antara PAD dan kinerja keuangan daerah telah diuji secara masif dalam literatur akuntansi sektor publik. Kajian terdahulu mengonfirmasi bahwa PAD memberikan stimulus positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, seperti yang dibuktikan oleh [1] dan [8]. Tingginya PAD mengindikasikan keberhasilan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, yang memberikan fleksibilitas fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi anggarannya. Namun, dinamika hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Penelitian oleh [3] justru menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Situasi semacam ini biasanya terjadi apabila peningkatan PAD tidak diimbangi dengan alokasi belanja yang produktif, atau ketika struktur pemungutan pajak lokal malah membebani efisiensi operasional daerah.

Melalui lensa Teori *Stewardship*, jajaran otoritas regional diposisikan selaku *steward* yang mengemban legitimasi moral untuk menyelaraskan artikulasi kebijakan dengan kemaslahatan publik, alih-alih mengutamakan utilitas personal. Ketika daerah mampu menghasilkan PAD yang tinggi, para *steward* dituntut untuk memanfaatkan kekayaan internal tersebut secara bertanggung jawab demi kemakmuran masyarakat. Berdasarkan teori ini, peningkatan pendapatan asli daerah dipandang sebagai peningkatan modal kerja bagi kepala daerah untuk mengaktualisasikan program-program strategis yang bermuara pada perbaikan kinerja tata kelola keuangan secara menyeluruh. Karena itulah, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₀1: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

H_a1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

2.7. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Pengujian empiris mengenai dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan daerah menghasilkan pandangan yang beragam. Di satu sisi, beberapa peneliti menemukan bahwa DAK berimplikasi negatif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah [10]. Kondisi ini disinyalir timbul karena DAK yang dikonsentrasikan pada infrastruktur fisik dasar membantu daerah mengamankan standar pelayanan minimal tanpa harus mengurus kas internalnya. Di sisi lain, terdapat riset yang membuktikan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah [3]. Ketidakberpengaruhannya ini umumnya disebabkan oleh sifat DAK yang sangat kaku, di mana daerah hanya menjadi pelaksana teknis dari otoritas pusat, sehingga minimnya fleksibilitas penggunaan anggaran ini sering kali memicu inefisiensi atau keterlambatan penyerapan di lapangan.

Ditinjau dari aspek Teori *Stewardship*, keberadaan DAK berfungsi sebagai instrumen eksternal yang memperkuat kapasitas *steward* dalam memenuhi kebutuhan dasar para principal. Teori ini mengasumsikan bahwa aparat pemerintah didorong oleh motivasi intrinsik untuk mencapai keberhasilan organisasi. Dengan adanya kucuran DAK dari pemerintah pusat untuk program prioritas nasional, para *steward* memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menunjukkan kapabilitas serta akuntabilitas mereka dalam membangun fasilitas publik yang bermutu, yang pada akhirnya akan mendongkrak skor efektivitas dan kinerja keuangan daerah. Atas dasar pemikiran tersebut, dirumuskan hipotesis: Lebih lanjut, DAK berpotensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah karena sifat penggunaannya yang kaku dan terikat (*specific grant*), sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan diskresi dalam mengalokasikan dana tersebut untuk program yang mendorong kemandirian fiskal.

H₀2: Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

H_a2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

2.8. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai instrumen penyeimbang celah fiskal sering kali memicu perdebatan dalam kajian empiris. Riset terdahulu yang dilakukan oleh [14] menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena sifatnya yang berupa block grant memberi keleluasaan penuh bagi daerah untuk membiayai operasional rutin dan aparatur negara secara stabil. Sebaliknya, studi lain oleh [2], menemukan bahwa DAU tidak memberi dampak terhadap kinerja keuangan. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan dampak *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah

cenderung menjadi manja dan kurang efisien dalam mengelola anggaran ketika menerima dana transfer umum yang besar dari pusat, sehingga alokasi dana tersebut habis untuk belanja pegawai ketimbang belanja publik yang produktif.

Bersandarkan pada lensa Teori *Stewardship*, instrumen DAU diinterpretasikan sebagai bentuk legitimasi kepercayaan yang diamanahkan oleh pemerintah pusat kepada jajaran daerah dalam kapasitasnya sebagai eksekutif pengelola dana penyeimbang. Teori ini menekankan bahwa *steward* akan merasa lebih termotivasi ketika mereka diberikan otonomi dan tanggung jawab yang penuh tanpa pengawasan yang terlalu restriktif. Fleksibilitas penggunaan DAU seharusnya memicu para *steward* untuk menyelaraskan belanja rutin dan belanja modal secara bijaksana, sehingga disparitas fiskal dapat dikurangi dan efisiensi anggaran daerah dapat ditingkatkan demi kepuasan principal. Atas dasar pemikiran tersebut, dirumuskan hipotesis:

H₀3: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

H_a3: Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

2.9. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

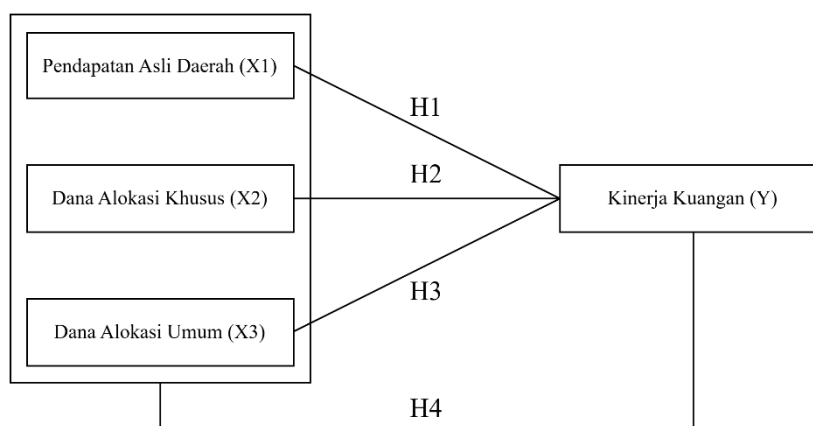
Secara simultan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipengaruhi secara krusial oleh kombinasi antara modalitas pendanaan internal (PAD) dan stimulus eksternal (DAK dan DAU). Signifikansi pengaruh ketiga komponen pendapatan tersebut secara bersama-sama terhadap performa finansial yurisdiksi lokal telah dibuktikan lewat serangkaian riset kolektif terdahulu seperti pada [2] dan [3]. Ketersediaan dana yang seimbang antara kemandirian lokal dan dukungan transfer pusat dinilai mampu menciptakan ruang fiskal yang sehat bagi daerah untuk bergerak lincah.

Dalam kerangka Teori *Stewardship*, totalitas dari seluruh sumber daya keuangan daerah (baik PAD, DAK, maupun DAU) ditempatkan sebagai modalitas primer bagi *steward* guna merealisasikan target organisasi yang telah diamanahkan oleh konstituen. Capaian kinerja keuangan tidak dapat ditakar hanya dari satu koridor penerimaan saja, melainkan dilihat dari bagaimana seluruh instrumen finansial tersebut diintegrasikan secara simultan oleh jajaran kepala daerah. Keselarasan tendensi antara kepala daerah dan masyarakat akan terwujud tatkala seluruh spektrum pendapatan baik yang dihimpun dari pajak lokal maupun transfer vertikal pusat dikelola dalam satu kesatuan ekosistem ekonomi yang transparan, akuntabel, serta berorientasi penuh pada kemaslahatan publik. Berangkat dari alur penalaran tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₀4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

H_a4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024.

Berdasarkan uraian pengembangan hipotesis di atas, berikut ini disajikan kerangka hipotesis penelitian.



Gambar 1. Kerangka Hipotesis
Sumber: Hasil Olah Penulis (2026)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pendekatan metodologi dalam studi ini menerapkan analisis kuantitatif deskriptif yang diproses secara terkomputerisasi melalui SPSS versi 30. Data yang dimanfaatkan berupa data sekunder dengan format data panel dari periode 2020–2024 yang bersumber dari situs resmi DJPK Kemenkeu dan PPID masing-masing pemerintah kota, dengan fokus dokumen pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta literatur jurnal terdahulu penunjang riset. Metode penarikan sampel menerapkan pendekatan non-probability sampling melalui teknik sampel jenuh (sensus) yang ditargetkan kepada seluruh populasi kota di bawah yurisdiksi Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 6 entitas (Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, dan Tegal). Melalui pengamatan selama 5 tahun pada ke-6 kota tersebut, diperoleh total unit analisis pengamatan sebanyak 30 data observasi (6 Kota x 5 Tahun) yang siap diuji menggunakan model regresi linear berganda dengan formula berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Yang mana:

Y, Melambangkan Kinerja Keuangan (Rasio Kemandirian)

X1, Melambangkan Pendapatan Asli Daerah

X2, Melambangkan Dana Alokasi Khusus

X3, Melambangkan Dana Alokasi Umum

α , Melambangkan Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, Melambangkan Koefisien Regresi

e, melambangkan *error* atau *disturbance term*

3.2. Metode Analisis Data

Tahapan pemrosesan data dengan persamaan tersebut diawali Uji Analisis Statistik Deskriptif untuk memetakan karakteristik angka dasar data, lalu dilanjutkan serangkaian Uji Asumsi Klasik yang mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas demi menjamin kelayakan model regresi agar terbebas dari bias statistik. Sesudah model memenuhi kriteria asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linear berganda beserta pengujian hipotesis yang mencakup Uji t (parsial), Uji F (simultan), dan analisis koefisien determinasi (R^2), di mana seluruh rangkaian pengujian kuantitatif ini dijalankan dengan dukungan penuh perangkat lunak statistik SPSS versi 30 sehingga rumusan masalah penelitian dapat dijawab secara akurat sekaligus membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan. Perlu dicatat bahwa Uji Autokorelasi pada dasarnya diperlukan untuk data runtut waktu (*time series*). Namun, karena penelitian ini menggunakan data panel yang turut memuat dimensi waktu, uji ini tetap relevan untuk dilakukan.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR (RUMUS)	SKALA PENGUKURAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Segala bentuk penerimaan yang dihimpun daerah dari potensi internal wilayahnya sendiri bersandarkan regulasi lokal demi menciptakan keleluasaan fiskal yang mandiri [15].	Rasio Pendapatan Asli Daerah = $\frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Skala Rasio
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kucuran dana transfer vertikal untuk menopang	Rasio Dana Alokasi Khusus = $\frac{\text{Total Realisasi Penerimaan DAK}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Skala Rasio

	program pelayanan publik yang bersifat fisik dan khusus yang sejalan dengan agenda prioritas nasional [16]. DAK merupakan transfer bersyarat (<i>specific grant</i>).		
Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana perimbangan yang bersumber dari APBN dan disalurkan guna menyetarakan kapasitas keuangan antardaerah agar setiap daerah sanggup membiayai kebutuhan belanja dalam kerangka desentralisasi [15].	$\text{Rasio Dana Alokasi Umum} = \frac{\text{Total Realisasi Penerimaan DAU}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Skala Rasio
Kinerja Keuangan (Rasio Kemandirian)	Ukuran proksi atas keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan seberapa besar kebergantungan pemerintah daerah pada sokongan pembiayaan dari pihak eksternal (pusat/provinsi) [1].	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$	Skala Rasio

Sumber: Hasil Olah Penulis (2026)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Deskriptif Statistik

Data berskala rasio diaplikasikan dalam studi ini sebagai basis pelaksanaan analisis statistik deskriptif. Guna memetakan distribusi serta karakteristik data secara holistik, pengukuran berbasis rasio ini dijawabantahkan lewat empat parameter utama, yang meliputi nilai paling rendah (*minimum*), nilai paling tinggi (*maximum*), rerata hitung (*mean*), serta tingkat deviasi standar. Karakteristik sekaligus sebaran angka dasar dari setiap variabel yang diamati secara perinci disajikan pada Tabel 2 berikut::

Tabel 2. *Output* Estimasi Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	-1.42	-.61	-1.1189	.23282
DAK	30	-2.71	-1.82	-2.2285	.22418
DAU	30	-1.49	-.74	-.9300	.22705
Kemandirian	30	-1.00	.40	-.5432	.41845
<i>Valid N (listwise)</i>	30				

Sumber: *Output* SPSS 30 (2026)

Bersandarkan pada output tabulasi statistik deskriptif yang dipaparkan pada Tabel 2, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdeteksi menorehkan nilai paling rendah sebesar -1,42 serta capaian paling tinggi pada angka -0,61, di mana pemusatan data (*mean*) berada di posisi -1,1189 dengan sebaran deviasi standar mencapai 0,23282. Pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), batas paling rendah diidentifikasi pada angka -2,71 dan titik paling tinggi menyentuh -1,82, yang kemudian diikuti oleh perolehan nilai tengah sebesar -2,2285 serta indeks standar deviasi sebesar 0,22418. Selanjutnya, fluktuasi data pada Dana Alokasi Umum (DAU) diilustrasikan melalui rentang nilai paling rendah -1,49 hingga batas paling tinggi -0,74, dengan perolehan rata-rata sebesar -0,9300 serta tingkat standar deviasi pada angka 0,22705. Terakhir, variabel Kemandirian Keuangan Daerah dicatat memiliki sebaran nilai antara -1,00 selaku titik paling rendah hingga 0,40 sebagai capaian paling tinggi, di mana perolehan *mean* ditemukan sebesar -0,5432 dengan iringan deviasi standar pada indeks 0,41845. Perlu dijelaskan bahwa munculnya nilai minimum dan maksimum yang negatif pada seluruh variabel disebabkan oleh data rasio yang telah ditransformasi terlebih dahulu (melalui logaritma natural/standarisasi) untuk keperluan analisis, sehingga nilai negatif tersebut bukan menunjukkan rasio keuangan yang negatif secara nominal.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

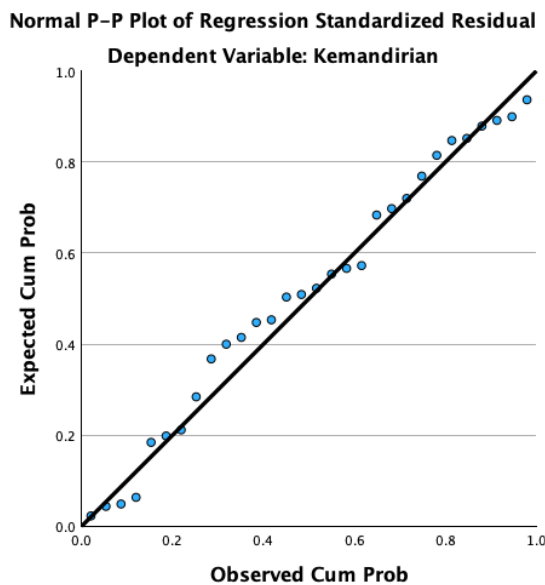
Tahap ini dilakukan untuk menguji jikalau nilai residual atau error dalam model regresi sudah menyebar secara normal. Pembuktiannya diperiksa melalui dua cara, yaitu lewat pengamatan visual pada grafik *P-P Plot* dan perhitungan statistik menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Kesimpulan dari pengujian ini diambil berdasarkan nilai signifikansi (probabilitas), di mana data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Hasil lengkap dari uji *Kolmogorov-Smirnov* tersebut dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. *Output* Estimasi Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		30
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.02108608
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.094
	<i>Positive</i>	.080
	<i>Negative</i>	-.094
<i>Test Statistic</i>		.094
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		.200 ^d

Sumber: *Output* SPSS 30 (2026)

Berpijak pada Tabel 3, memperlihatkan nilai *Asymp. Sig. 2-tailed* sebesar 0,200. Mengingat nilai tersebut melampaui 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi secara normal. Perlu dicatat bahwa nilai 0,200 merupakan batas maksimum signifikansi yang dilaporkan oleh SPSS, sehingga semakin menegaskan bahwa residual terdistribusi secara normal. Temuan ini diperkuat oleh tampilan grafik *P-P Plot*, di mana persebaran noktah data tampak berkelompok serta selaras dengan lajur diagonalnya. Kedua hasil tersebut menegaskan bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas, sebagaimana yang divisualisasikan dalam Gambar berikut:



Gambar 2. Grafik P.P Plot
Sumber: Output SPSS 30 (2026)

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Prosedur verifikasi ini diarahkan guna mengidentifikasi ada atau absennya korelasi linier yang tinggi di antara sesama faktor independen di dalam persamaan estimasi. Karakteristik model yang andal dipersyaratkan terhindar dari hubungan erat antarvariabel independen, yang ditunjukkan oleh nilai *Tolerance* melampaui 0,10 serta skor VIF yang tidak melewati angka 10. Output kalkulasi multikolinearitas untuk tiap-tiap prediktor tersebut disajikan melalui paparan Tabel berikut:

Tabel 4. Output Estimasi Multikolinearitas			
<i>Coefficients^a</i>			
		<i>Collinearity Statistics</i>	
Model		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	.	
	PAD	.167	6.006
	DAK	.731	1.369
	DAU	.168	5.962

a. *Dependent Variable: Rasio Kemandirian*

Sumber: Output SPSS 30 (2026)

Merujuk pada paparan Tabel 4, variabel PAD tercatat memiliki nilai *Tolerance* 0,167 dengan VIF 6,006. Variabel DAK mencatatkan nilai *Tolerance* tertinggi sebesar 0,731 dengan VIF 1,369. Sementara itu, variabel DAU memiliki nilai *Tolerance* 0,168 dan VIF 5,962. Mengingat seluruh variabel independen secara konsisten memperlihatkan angka *Tolerance* melampaui parameter terendah 0,10 ($> 0,10$) ditambah lagi ukuran VIF yang tidak melewati ambang batas maksimal 10 (< 10), oleh karena itu diperoleh kepastian mengenai kelayakan persamaan linear ini untuk terhindar multikolinearitas. Meskipun seluruh nilai VIF berada di bawah 10, nilai VIF untuk PAD (6,006) dan DAU (5,962) tergolong cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi yang cukup erat antara PAD dan DAU yang kemungkinan disebabkan oleh struktur anggaran daerah. Namun, karena VIF masih di bawah 10, multikolinearitas tidak dianggap sebagai masalah serius.

4.2.3. Uji Autokorelasi

Tahap pengujian ini ditempuh guna menilai ada-tidaknya hubungan saling memengaruhi antara galat pengganggu pada suatu periode (T) dan galat pengganggu satu periode sebelumnya (T-1). Alat ukur yang dipakai untuk menilainya berupa angka Durbin-Watson (DW). Hasil estimasi dan rangkuman nilai Durbin-Watson terangkum pada Tabel berikut:

Tabel 5. *Output* Estimasi Autokorelasi

Model Summary^b		
Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.02227	2.039

Sumber: *Output* SPSS 30 (2026)

Mengacu pada tabel 5, persamaannya adalah:

$(n ; k) = (30 ; 3)$

Durbin-Watson (DW) = 2,039

Durbin-Watson Upper (DU) = 1,6489

4 – Durbin-Watson Upper = 2,3511

Hasil Kesimpulan = $1,6489 < 2,039 < 2,3511$

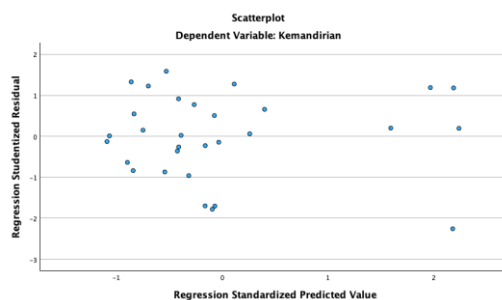
= $DU < DW < 4-DU$

= Tidak Terjadi Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson sebesar 2,039 yang berada mendekati angka 2 merupakan indikasi ideal bahwa model regresi terbebas dari gejala autokorelasi.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Prosedur ini diarahkan guna mendeteksi ada atau absennya ketidaksamaan varians residual antar-pengamatan di dalam model regresi. Dualisme pendekatan diaplikasikan dalam studi ini, yaitu analisis visual grafik *Scatterplot* serta pembuktian statistik melalui Uji Glejser. Pada metode pertama, pola persebaran noktah residual pada grafik *Scatterplot* diamati secara langsung. Adapun output visualisasi grafik tersebut dipaparkan pada Gambar 3 berikut::

Gambar 3. Grafik *Scatterplot*Sumber: *Output* SPSS 30 (2026)

Melalui amatan visual pada Gambar 3, tumpukan noktah amatan terdistribusi secara difus dan seimbang di area positif maupun negatif melintasi angka 0 pada sumbu Y. Sebaran tersebut tidak terkonsentrasi di satu tempat serta terbebas dari pembentukan konfigurasi geometris yang teratur. Kondisi ini menandakan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, tanda dari tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Guna mengeliminasi subjektivitas visual, Uji Glejser diaplikasikan sebagai pembuktian statistik yang objektif dengan menempatkan nilai *absolut residual* (*Abs_Res*) ditempatkan sebagai variabel dependen yang diregresikan oleh seluruh faktor independen di dalam model. Rangkuman kalkulasi tersebut dipaparkan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. *Output* Estimasi Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.055	.060		.921
	PAD	.018	.026	.320	.681
	DAK	.007	.013	.116	.516
	DAU	.005	.027	.083	.176

a. *Dependent Variable: Abs_Res*

Sumber: *Output* SPSS 30 (2026)

Merujuk pada parameter Uji Glejser di Tabel 6, model regresi dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila indeks signifikansi (Sig.) antara prediktor dengan nilai *absolut residual* melampaui angka 0,05. Berdasarkan hasil kalkulasi, nilai signifikansi untuk PAD tercatat pada angka 0,502, DAK menyentuh 0,610, dan DAU mencapai 0,861. Karena seluruh indeks signifikansi tersebut secara konsisten berada di atas ambang batas 0,05, temuan statistik ini memperkuat analisis visual grafik Scatterplot sebelumnya. Ketidadaan gejala heteroskedastisitas ini menegaskan terpenuhinya prasyarat asumsi klasik, sehingga kelayakan persamaan regresi untuk tahapan estimasi berikutnya telah terpenuhi.

4.3. Uji Regresi Linear Berganda

Arah serta besaran dampak dari PAD, DAK, dan DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah diidentifikasi melalui pengaplikasian metode analisis regresi linear berganda. Estimasi parameter dari pemodelan tersebut dipaparkan secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 7. *Output* Estimasi Regresi Linear Berganda

		<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.152	.101		1.509
	PAD	1.211	.044	.674	27.815
	DAK	-.039	.022	-.021	-1.799
	DAU	-.616	.044	-.334	-13.851

a. *Dependent Variable*: Rasio Kemandirian

Sumber: *Output* SPSS 30 (2026)

Merujuk pada Tabel 7, persamaan regresi linear berganda dinyatakan dengan formula berikut:

$$Y = 0,152 + 1,211 (X_1) - 0,039 (X_2) - 0,616 (X_3) + e$$

Melalui formula yang terbentuk, nilai konstanta sebesar 0,152 memproyeksikan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berada pada angka tersebut ketika kondisi PAD, DAK, dan DAU diasumsikan nihil atau konstan. Selanjutnya, korelasi positif dan searah ditunjukkan oleh koefisien PAD sebesar 1,211, di mana setiap penambahan satu satuan PAD diestimasi bakal menaikkan level Kemandirian Keuangan Daerah sebanyak 1,211 satuan dengan prasyarat prediktor lain tidak berubah. Sebaliknya, hubungan yang berkebalikan digambarkan oleh koefisien DAK sebesar -0,039, sehingga lonjakan satu satuan pada sektor DAK diprediksi akan mereduksi Kemandirian Keuangan Daerah sebanyak 0,039 satuan. Dampak yang berkebalikan juga diperlihatkan oleh parameter DAU senilai -0,616, di mana reduksi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sejumlah 0,616 poin diproyeksikan terjadi akibat dari tiap peningkatan tiap unit DAU dengan asumsi faktor prediktor lainnya bernilai konstan. Adapun nilai konstanta sebesar 0,152 secara statistik tidak signifikan, hal ini wajar dan tidak memengaruhi interpretasi koefisien regresi masing-masing variabel.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Uji t (Parsial)

Estimasi statistik secara parsial dipakai untuk menakar sejauh mana sumbangan tiap variabel bebas secara sendiri-sendiri dalam menerangkan pergerakan variabel terikat. Patokan keputusannya bertumpu pada angka signifikansi: manakala angka itu berada di bawah 0,05 ($< 0,05$), hipotesis dinyatakan diterima sehingga variabel bebas terbukti berpengaruh nyata; sebaliknya, jika angka signifikansi melampaui 0,05 ($> 0,05$), hipotesis ditolak lantaran pengaruhnya dipandang tidak nyata. Rangkuman dari output estimasi statistik secara parsial (Uji t) dalam studi ini dipaparkan melalui Tabel 8 berikut:

Tabel 8. *Output* Estimasi Uji t (Parsial)

		<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.152	.101		1.509
	PAD	1.211	.044	.674	27.815
	DAK	-.039	.022	-.021	-1.799

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020-2024 (Ricco Andhika Hudayaa)

DAU	-.616	.044	-.334	-13.851	<.001
-----	-------	------	-------	---------	-------

a. *Dependent Variable:* Rasio Kemandirian

Sumber: *Output SPSS 30 (2026)*

Merujuk pada output di Tabel 8, estimasi parameter serta penarikan kesimpulan hipotesis secara parsial didasarkan pada batas toleransi kekeliruan sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berikut rincian dari hasil pengujian.

- Nilai *sig* untuk PAD ditemukan berada pada angka $< 0,001$. Oleh karena nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan ($< 0,001 < 0,05$) disertai dengan parameter regresi yang berarah positif, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Melalui hasil ini, dapat dinyatakan bahwa PAD memberikan dampak signifikan karena nilai *sig* berada di bawah ambang batas, dengan arah hubungan yang positif karena koefisien regresinya bertanda positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. Nilai *t* hitung untuk PAD yang sangat tinggi, yaitu sebesar 27,815, mengindikasikan dominasi PAD dalam menentukan kinerja keuangan daerah.
- Nilai *sig* untuk DAK ditemukan berada pada angka 0,084. Oleh karena nilai tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan ($0,084 > 0,05$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Melalui hasil ini, dapat dinyatakan bahwa DAK tidak memberikan dampak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.
- Nilai *sig* untuk DAU ditemukan berada pada angka $< 0,001$. Oleh karena nilai tersebut berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan ($< 0,001 < 0,05$) disertai dengan parameter regresi yang berarah negatif, maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Melalui hasil ini, dapat dinyatakan bahwa DAU memberikan dampak signifikan karena nilai *sig* berada di bawah ambang batas, dengan arah hubungan yang negatif karena koefisien regresinya bertanda negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. Nilai *t* hitung untuk DAU sebesar -13,851 juga tergolong tinggi, yang menunjukkan kuatnya pengaruh negatif DAU terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.4.2. Uji f (Simultan)

Pengujian gabungan (Uji F) dimaksudkan guna mengonfirmasi apakah keseluruhan variabel bebas, yakni PAD, DAK, dan DAU, secara gabungan memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel terikat berupa Kemandirian Keuangan Daerah.. Untuk menentukan kelayakan model melalui perbandingan nilai, terlebih dahulu dicari nilai F_{Tabel} dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ menggunakan rumus berikut.

Rumus F_{Tabel}	: $F(k; n - k - 1)$
df 1 (jumlah variabel bebas)	: $k = 3$
df 2 (residual/derajat bebas)	: $n - k = 30 - 3 - 1 = 26$
$F_{Tabel}(3; 26)$	: 2,98

Setelah mengetahui nilai batas pada F_{Tabel} , nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai F_{Hitung} yang diperoleh dari output ANOVA pada pengolahan data SPSS. Berikut Tabel ringkasan output estimasi uji f (simultan):

Tabel 9. *Output Estimasi Uji f (Simultan)*

ANOVA ^a							
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	5.065	3	1.688	3404.435	<.001 ^b	
	Residual	.013	26	.000			
	Total	5.078	29				

a. *Dependent Variable:* Kemandirian

b. *Predictors:* (Constant), DAU, DAK, PAD

Sumber: *Output SPSS 30 (2026)*

Dari data di atas, diperoleh nilai F_{Hitung} sebesar 3404,435 yang nilainya melampaui nilai F_{Tabel} yaitu 2,98. Dan ini diperkuat dengan capaian nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar $< 0,001$, jauh di bawah nilai standar taraf 0,05 ($< 0,001 < 0,05$). Berdasarkan pemenuhan syarat pengujian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama (simultan), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil statistik ini membuktikan bahwa model regresi yang diestimasi masuk dalam kategori sangat layak (*fit*) serta memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen.

4.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini diterapkan guna mengukur kapasitas struktur pemodelan regresi untuk menjabarkan keragaman variabel terikat. Adapun rentang nilai koefisien ini terbentang mulai dari nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Dalam penelitian yang melibatkan multivariabel prediktor, penggunaan nilai *Adjusted R Square* lebih direkomendasikan akibat sifat fluktuatifnya yang mampu bergeser seiring masuknya instrumen tambahan ke dalam struktur pemodelan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat dan objektif. Berikut rangkuman hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 10. *Output* Estimasi Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.999 ^a	.997	.997	.02227

a. *Predictors: (Constant), DAU, DAK, PAD*

b. *Dependent Variable: Kemandirian*

Sumber: *Output* SPSS 30 (2026)

Melalui output pada Tabel 10, nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan dari proses komputasi tercatat sebesar 0,997, yang mengindikasikan bahwa sebanyak 99,7% fluktuasi pada Kemandirian Keuangan Daerah mampu dijabarkan secara serempak oleh kombinasi PAD, DAU, dan DAK. Adapun sisa proporsi sejumlah 0,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain di luar pemodelan regresi yang tidak dilibatkan dalam batasan studi ini. Tingginya capaian indikator *Adjusted R Square* yang mendekati angka sempurna ini menegaskan bahwa integrasi antara pendapatan lokal dengan dana transfer pusat merupakan komponen determinan yang sangat kuat dalam menentukan postur kemandirian fiskal daerah. Perlu dicatat bahwa nilai *Adjusted R Square* yang sangat tinggi ini turut dipengaruhi oleh struktur data yang saling terkait, mengingat PAD, DAK, dan DAU merupakan komponen utama pendapatan daerah. Meskipun demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang sangat baik.

4.6. Pembahasan Hasil Uji

4.6.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Melalui lensa Teori *Stewardship*, aparat pemerintah daerah diorientasikan sebagai *steward* yang amanah dalam mengoptimalkan seluruh potensi fiskal lokal demi memprioritaskan kemaslahatan principal atau masyarakat. Optimalisasi tersebut diwujudkan melalui realisasi pendapatan lokal yang tinggi, yang sekaligus merefleksikan keberhasilan dalam mengaktualisasikan kemandirian anggaran tanpa adanya ketergantungan ekstrem terhadap pasokan dana eksternal. Pola hubungan ini selaras dengan hasil pengujian statistik parametrik menggunakan instrumen Uji t secara parsial, di mana parameter regresi ditemukan berarah positif disertai dengan tingkat kekeliruan di bawah ambang batas $\alpha = 0,05$. Berdasarkan output empiris tersebut, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2020 sampai 2024 secara individu. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah berhasil mengoptimalkan PAD meskipun berada dalam kondisi krisis akibat pandemi. Temuan empiris ini tercatat sejalan dan mendukung hasil riset dari [14] serta [2] yang menyatakan bahwa penguatan basis pendapatan internal berbanding lurus dengan performa keuangan daerah, namun tidak sejalan dengan studi [3] yang berargumen bahwa PAD tidak berdampak signifikan akibat adanya inefisiensi alokasi pada belanja operasional.

4.6.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Jika dikaji berdasarkan Teori *Stewardship*, tidak adanya pengaruh signifikan ini disebabkan oleh karakteristik DAK sebagai *specific grant* atau transfer bersyarat yang peruntukannya telah ditentukan secara ketat oleh pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan khusus daerah. Akibatnya, para *steward* atau pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan atau diskresi penuh dalam mengalokasikan dana tersebut untuk program-program yang dapat mendongkrak pendapatan asli secara mandiri, sehingga fluktuasi nilai DAK tidak memberikan stimulus langsung terhadap struktur kemandirian fiskal daerah. Kondisi tersebut selaras dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji t secara parsial yang menunjukkan bahwa DAK memiliki tingkat signifikansi yang berada di atas ambang batas $\alpha = 0,05$, yaitu sebesar 0,084. Melalui output statistik ini, diindikasikan bahwa secara parsial, DAK tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian dari [2] dan [3]. Melalui hasil tersebut, diindikasikan bahwa Dana Alokasi Khusus secara individu tidak memberikan kontribusi signifikan bagi postur kemandirian anggaran di tingkat daerah. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pasokan dana

transfer yang bersifat mengikat dari pemerintah pusat tersebut umumnya habis dialokasikan pada sektor pembangunan infrastruktur fisik yang kaku, sehingga gagal menciptakan efek pengganda bagi optimalisasi penerimaan PAD setempat. Namun, hasil pengujian ini kontras dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh [10] yang menemukan bahwa DAK memiliki pengaruh signifikan namun bernilai negatif, yang mengindikasikan bahwa semakin besar ketergantungan daerah terhadap alokasi dana khusus justru berisiko menurunkan dorongan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kemandirian fiskalnya sendiri.

4.6.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Hubungan bersignifikansi negatif terjadi secara matematis karena peningkatan alokasi DAU akan memperbesar komponen pendapatan transfer pada penyebut rumus Rasio Kemandirian, sehingga secara otomatis menekan persentase skor akhir kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan Teori *Stewardship*, fenomena ini mengindikasikan adanya kecenderungan di mana para *steward* daerah berada dalam zona nyaman fiskal atau *fiscal comfort zone*. Kemudahan akses dana eksternal dari pusat tersebut justru dikhawatirkan mengendurkan motivasi mereka dalam mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah atau PAD untuk membiayai kebutuhan operasional dasar secara mandiri. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh hasil estimasi data sekunder menggunakan Uji t secara parsial, di mana DAU menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai negatif dengan perolehan angka signifikansi yang berada di bawah $\alpha = 0,05$, yaitu kurang dari 0,001. Melalui output statistik ini, dibuktikan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan namun berarah negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan empiris ini sejalan dengan hasil studi dari [10] dan [3] yang menunjukkan bahwa alokasi DAU berdampak negatif terhadap kemandirian fiskal karena adanya dampak substitusi yang menggeser urgensi penggalan potensi pajak dan retribusi lokal, tetapi kontras dengan penelitian dari [14] yang menyatakan bahwa DAU dapat memberikan dampak positif apabila dialokasikan secara taktis pada program pelayanan publik produktif yang mampu merangsang pertumbuhan investasi daerah.

4.6.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Guna menguji dampak secara serempak, output pemodelan melalui instrumen Uji F dalam perangkat lunak SPSS versi 30 menghasilkan angka sig sebesar $<0,001$. Mengingat nilai tersebut berada di bawah ambang batas kesalahan $\alpha = 0,05$, diperoleh bukti empiris bahwa PAD, DAK, dan DAU secara bersama-sama memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah sepanjang periode 2020 sampai 2024. Melalui argumentasi berbasis Teori *Stewardship*, ditegaskan bahwa akumulasi bauran fiskal yang mengintegrasikan kapasitas finansial internal dengan instrumen *transfer* vertikal ini menjadi stimulus utama bagi para *steward*. Ketersediaan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mengeksekusi berbagai program kerja daerah secara transparan dan akuntabel demi mengakomodasi kepentingan masyarakat selaku *principal*. Secara empiris, kesimpulan pengujian simultan ini sangat sejalan dan memperkuat pondasi hasil penelitian yang digagas oleh [2] dan [3] yang menyatakan bahwa integrasi sinergis antara instrumen pendapatan lokal dan dana perimbangan pusat mutlak diperlukan demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan mandiri. Meskipun secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan, perlu dicatat bahwa secara parsial DAK tidak berpengaruh signifikan, sehingga kontribusi DAK dalam model simultan ini lebih bersifat marginal atau bekerja melalui interaksinya dengan variabel pendapatan lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui inferensi eksplanatif atas data dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa sepanjang periode 2020-2024, PAD memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara positif dan signifikan. Sebaliknya, DAU berpengaruh signifikan namun berarah negatif akibat dampak substitusi yang menggeser urgensi penggalan potensi lokal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan karena sifat peruntukannya yang kaku sebagai *specific grant* dari pusat. Meski demikian, secara simultan kombinasi PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi adanya *fiscal comfort zone* akibat besarnya DAU serta sifat kaku DAK sebagai *specific grant*. Bertumpu pada kesimpulan tersebut, disarankan bagi pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam mengoptimalkan intensifikasi dan diversifikasi sektor pajak serta retribusi lokal guna mendongkrak PAD, sekaligus tidak terlena dalam zona nyaman fiskal akibat kucuran dana transfer pusat agar operasional dasar daerah dapat dibiayai secara mandiri. Selanjutnya, bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media edukasi dan referensi empiris yang informatif untuk memahami dinamika tata kelola keuangan publik serta penerapan Teori *Stewardship* pada instansi pemerintah. Bagi peneliti berikutnya, direkomendasikan untuk mengamplifikasi ruang lingkup amatan hingga mencakup seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta memperpanjang periode pengamatan guna mengatasi keterbatasan jumlah observasi. Selain itu, disarankan

untuk mengintegrasikan instrumen potensial lain seperti Pendapatan Transfer, Belanja Daerah, atau Produk Domestik Regional Bruto guna memberikan gambaran performa keuangan daerah secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. P. Putri and D. Ratnawati, “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 6, no. 2, pp. 2068–2082, 2023, doi: 10.36778/jesya.v6i2.1230.
- [2] E. Y. Pradana and N. Handayani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 2, pp. 192–209, 2023, doi: 10.24034/jiaku.v2i2.5979.
- [3] C. Ismayasari, Y. Ariessa, and W. Budi, “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI, DANA UMUM, ALOKASI KHUSUS DAN BAGI HASIL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH EKS KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016-2023 Candra,” *J. Ilm. Manaj. DAN Akunt.*, vol. 1, no. 4, pp. 48–57, 2024, doi: 10.69714/7d235309.
- [4] M. Ariska, R. Yani, and M. Mardhani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang,” *J. Penelit. Ekon. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 121–128, 2022, doi: 10.33059/jensi.v6i2.6455.
- [5] T. Noermanisa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di D.I. Yogyakarta,” *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 3, pp. 689–700, 2023, doi: 10.21776/jdess.2023.02.3.19.
- [6] H. Sriwijayanti, L. Gustina, and N. Apriyanti, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Kabupaten Solok Selatan,” *J. Penelit. Dan Pengkaj. Ilm. Sos. Budaya*, vol. 1, no. 1, pp. 124–137, 2022, doi: 10.47233/jppisb.v1i1.410.
- [7] Zikral, R. Kusumastuti, and G. W. M. Zulma, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021,” *J. Maneksi*, vol. 13, no. 1, pp. 110–118, 2024, doi: 10.31959/jm.v13i1.2159.
- [8] N. S. Pratama, U. Hamzani, M. Muhsin, R. Rusliyawati, and A. P. Karpriana, “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat,” *J. Innov. Manag. Account. Bus.*, vol. 4, no. 1, pp. 16–26, 2025, doi: 10.56916/jimab.v4i1.1080.
- [9] G. Z. Arakas, S. E. Kornita, and Indri Yovita, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru,” *South East Asian Manag. Concern*, vol. 1, no. 2, pp. 71–78, 2024, [Online]. Available: <https://journal.stedca.com/index.php/seamac>
- [10] S. U. Wati and Rismawandi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2023-2024,” *JIMBE J. Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekon.*, vol. 3, no. 6, pp. 58–69, 2024, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
- [11] M. F. Muchtar, D. S. Abbas, and S. B. Santoso, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal,” *MUQADDIMAH J. Ekon. Manajemen, Akunt. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 21–34, 2024, doi: 10.59246/muqaddimah.v1i3.571 Pengaruh.
- [12] M. Japar, Rustam, and A. R. Abdi, “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa,” *J. Magister Manaj. Nobel Indones.*, vol. 3, no. 2, pp. 161–175, 2022.
- [13] S. E. Situmorang, “Analisis Flypaper Effect terhadap Belanja dan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun 2022,” *Langgas J. Stud. Pembang.*, vol. 2, no. 1, pp. 28–36, 2023, doi: 10.32734/ljsp.v2i1.11383.
- [14] T. Erawati and E. K. Kelep, “Hubungan Dana Alokasi Umum, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lembata,” *J. E-Bis Ekon.*, vol. 7, no. 1, pp. 305–317, 2023, doi: 10.37339/e-bis.v7i1.1119.
- [15] D. Akbar, M. Murtala, and A. Asnawi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Aceh,” *J. Ekon. Reg. Unimal*, vol. 5, no. 1, p. 30, 2022, doi: 10.29103/jeru.v5i1.7918.
- [16] F. Nurmansyah and V. A. Tandean, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Transfer Khusus

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020-2024 (Ricco Andhika Hudayaa)

(Dtk) Terhadap Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Beberapa Daerah Otonomi,” *J. Budg. Isu dan Masal. Keuang. Negara*, vol. 8, no. 2, pp. 212–235, 2023, doi: 10.22212/jbudget.v8i2.172.